

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Suci Arti Rantika ^{a,1}; Muslim ^{a,2*}

^a Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Indonesia

¹ sucirantika4496@gmail.com; ² muslim.msi@uin-suska.ac.id

* muslim.msi@uin-suska.ac.id

 <https://doi.org/10.25134/jise.v4i2.132>

Article history: Received March 28, 2025; Revised May 7, 2025; Accepted May 16, 2025; Available online July 5, 2025

Abstrak: Penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Duanu sebagai Komunitas Adat terpencil (KAT) di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, masyarakat suku Duanu mengalami keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, seperti minimnya layanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Suku Duanu. Melalui pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat Suku Duanu. Teknik analisa data dilakukan dengan pengumpulan dan penyusunan data, mengelompokkan, kemudian dilakukan proses reduksi dengan cara merangkum atau memilih hal-hal yang penting serta data disajikan dalam bentuk bagan maupun uraian. Proses analisa dilakukan dengan menyandingkan data dengan teori serta peraturan yang berlaku untuk dapat ditarik kesimpulan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, pertimbangan tertentu terhadap narasumber yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemberdayaan masyarakat suku Duanu perlu dievaluasi secara kritis, karena seringkali program pemberdayaan tidak efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, kurangnya keberlanjutan program, dan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai adat lokal. Pemberdayaan Suku Duanu melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan dan perencanaan, tahap assesment, tahap implementasi serta tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan dan persiapan sudah teridentifikasi mengenai hambatan-hambatan utama dalam pengimplementasian program yang telah dijalankan, pada tahapan assesment terlihat belum optimal, kurang tepatnya sasaran dalam penerapan program pemberdayaan dikarenakan dalam pengklasifikasi data bantuan belum diproses dengan akurat, tahap implementasi sudah berjalan cukup baik namun terdapat hambatan dalam dimana keterbatasan anggaran dalam keberlanjutan program pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Komunitas Adat Terpencil; Suku Duanu

Abstracts: This research aims to explore and analyze the conditions and challenges faced by the Duanu Tribe as a remote Indigenous Community (KAT) in Indonesia. the context of globalization and modernization, the Duanu tribe community experiences limited access to basic social services, such as inadequate healthcare, education, and clean water availability. The main objective of this research is to understand the process of empowering the Duanu tribe community. Through a qualitative approach, the author collects data from various sources to obtain a comprehensive picture of the empowerment of the Duanu community. The data analysis technique was carried out by collecting and organizing the data, categorizing it, and then reducing it by summarizing or selecting important aspects, with the data presented in the form of charts or descriptions. The analysis process is carried out by comparing the data with applicable theories and regulations to draw conclusions. The determination of informants uses purposive sampling techniques, with specific considerations for sources who have characteristics relevant to the research objectives. The empowerment of the Duanu tribe community needs to be critically evaluated, as empowerment programs are often ineffective. Some things that need to be considered are the lack of participation from the indigenous community in planning, the lack of program sustainability, and the lack of attention to local cultural values. Empowerment of the Duanu Tribe through four stages:

preparation and planning stage, assessment stage, implementation stage, and evaluation stage. In the planning and preparation stage, the main obstacles in the implementation of the program have been identified. In the assessment stage, it appears to be suboptimal, with the targets in the implementation of the empowerment program not being accurately defined due to the inaccurate processing of aid data classification. The implementation stage has been running quite well, but there are obstacles related to budget constraints for the sustainability of the empowerment program.

Keyword: Empowerment; Remote Indigenous Communities; Duanu Tribe

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan kualitas hidup masyarakat adat yang terdapat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Komunitas ini umumnya masih sangat bergantung pada alam, hidup dengan nilai-nilai tradisional, dan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi serta aksesibilitas. Melalui pemberdayaan, masyarakat di dorong untuk lebih aktif dalam mengelola potensi lokal mereka secara berkelanjutan, tanpa harus kehilangan identitas budaya yang mereka miliki (Triatmanto et al., 2024). Tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Program pemberdayaan ini biasanya melibatkan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyediaan layanan dasar, serta perlindungan terhadap hak-hak adat dan kearifan lokal. Kehidupan Komunitas Adat Terpencil yang bertempat tinggal dipelosok dan berkelompok dengan cara berpindah-pindah juga memiliki keterbelakangan dari kondisi ekonomi, rentan sosial serta terisolasi (Unayah & Sabarisman, 2016). Pemerintah berkewajiban dalam menyediakan program-program pemberdayaan untuk KAT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan pemberdayaan. (Nawawi, 2021; Nurliatin et al., 2024; Thahir, 2019; Wirata, 2022)

Pemberdayaan merupakan tahap dari pemberdayaan seseorang dalam sebuah wadah tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menetapkan keputusan hidup, pemberdayaan juga dilihat untuk suatu tahap serta sasaran (Apriliandra et al., 2022; Habib, 2021). Pemberdayaan harus mengikutsertakan sekumpulan aktivitas yang disusun demi mengkokohkan suatu komunitas yang rentan di masyarakat. Kemudian sebagai tujuan, pemberdayaan menekankan pada menciptakan perubahan sosial, sehingga individu atau masyarakat dapat berkontribusi secara efisien untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka (Margayaningsih, 2016; Sururi, 2015). Pemberdayaan dapat dimaksudkan sebagai sebuah tahapan yang mengarah ke berdaya atau memberikan kekuatan serta potensi dari komunitas yang kuat kepada komunitas yang tidak kuat (Hikmawati, 2022; Tchida & Stout, 2024). Selanjutnya, pemberdayaan merupakan kumpulan tahapan mendalam secara keseluruhan dengan mendorong serta membimbing serta kumpulan masyarakat yang harus diberdayakan dengan mengembangkan keahlian, pelatihan dan peluang untuk memperoleh akses sistem kesistem sumber daya dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat (Irwani et al., 2023).

Suku Duanu merupakan Komunitas Adat Terpencil yang mendiami wilayah dengan akses terbatas (Hasanah & others, 2016; Nurliatin et al., 2024), tepatnya di Desa Panglima Raja yang memiliki jumlah KAT yaitu suku Duanu yang tinggi di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang merupakan desa pemekaran dari desa Concong Luar. Ditemukan sebanyak 380 KK dengan 1.460 Jiwa Suku Duanu di Desa Panglima Raja, dimana penghidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya alam terutama perairan, menangkap ikan secara tradisional, menongkah kerang yang menjadi tradisi turun temurun masyarakat Suku Duanu. Keterbatasan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara ekonomi dan penghidupan ini membuat Suku Duanu tidak berkembang. Masyarakat Suku Duanu yang bersifat homogen sangat mempertahankan budaya dan tradisi yang kuat, sehingga memiliki kesamaan dalam hal identitas sosial dan ekonomi. Aksesibilitas yang terbatas dimana harus ditempuh dengan transportasi laut dan lokasi komunitas yang sangat jauh berdampak pada minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai hal, pembangunan dan pemberdayaan yang pada prinsip dasar tidak dimengerti bagi masyarakat Suku Duanu. Diperburuk lagi dengan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, seperti minimnya layanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih yang hanya tergantung pada air hujan dengan memampung air hujan dengan wadah penampungan, sanitasi buruk yang berdampak pada kesehatan serta infrastruktur jalan kampung yang sangat memprihatinkan.

Dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Suku Duanu dipandang perlu diberdayakan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 mengenai perlindungan hak-hak warga negara

untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kemandirian KAT (Komunitas Adat Terpencil), serta negara mengamanahi Pemerintah Daerah agar suku terpencil ini diprioritaskan dalam pemberdayaan baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aksesibilitas sesuai dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 mengenai kader pemberdayaan masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kejadian yang dirasakan oleh subjek penelitian. Misalnya, tindakan, sikap, dan sebagainya yang dapat dijelaskan dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks ilmiah, atau dengan menggunakan beragam metode alamiah (Achjar et al., 2023), Teknik analisa data dilakukan dengan pengumpulan dan penyusunan data yang telah didapatkan dan mengelompokkan jenis-jenis data tersebut, kemudian dilakukan proses reduksi dengan cara merangkum atau memilih hal-hal pokok/penting serta data disajikan dalam bentuk badan maupun uraian singkat. Proses analisa dilakukan dengan menyandingkan data dengan teori-teori serta peraturan yang berlaku untuk dapat ditarik kesimpulan. Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti sudah melakukan pertimbangan tertentu terhadap narasumber yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian yang dianggap mewakili populasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yaitu Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Camat Concong, Staf Kantor Desa Panglima Raja dan masyarakat. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian komunitas adat Suku Duanu yang terpencil di Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, adalah dengan pemberdayaan. Suku Duanu, juga dikenal sebagai suku laut, tinggal di pantai dan pulau-pulau kecil dan sangat bergantung pada hasil laut. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya tentang pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga tentang penguatan kapasitas sosial dan budaya. Melalui program pemberdayaan, mereka diharapkan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi produktif, dan perlindungan terhadap hak-hak adat dan lingkungan mereka. Selain itu, program pemberdayaan juga mencakup pelestarian budaya lokal untuk menjaga identitas dan nilai-nilai kearifan lokal.

Tahap Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap persiapan dan perencanaan dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mengacu pada proses awal yang dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan yang akan diterapkan pada Komunitas Adat Terpencil yang kurang dapat perhatian untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tahap ini sangat perlu dikarenakan untuk menentukan keberhasilan semua proses pemberdayaan. Di tahap ini Dinas Sosial sudah menugaskan beberapa pegawai/staff untuk turun langsung kelapangan atau daerah yang masyarakatnya menjadi target dalam proses pemberdayaan dalam bentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) untuk melakukan proses implementasi program yang sudah menjadi rencana oleh pihak Dinas Sosial untuk diberikan kepada masyarakat KAT tepatnya masyarakat suku Duanu yang ada di kecamatan Concong Desa Panglima Raja.

Adapun program-program pemberdayaan KAT yaitu: pembangunan rumah layak huni yang disediakan oleh kementerian melalui sebagian anggaran APBN tapi tetap termasuk program untuk KAT yang dijalankan oleh Dinas Sosial, bantuan sosial, bimbingan/sosialisasi KAT, dan bantuan alat mata pencaharian diharapkan agar masyarakat tersebut dapat diberdayakan dengan semestinya sesuai dengan anggaran yang telah diturunkan untuk program pemberdayaan KAT.

Berikut uraian anggaran program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil:

Tabel 1. Anggaran Program Pemberdayaan KAT

Jenis Bantuan	Jumlah (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.)
Bimbingan sosialisasi	35 Juta	3 Kali	105 Juta
Bantuan uang tunai	3 Juta	27 Kepala Keluarga	81 Juta
Bantuan sembako	1 Juta	27 Kepala Keluarga	108 Juta
Bantuan alat mata pencaharian	30 Juta	4 Keluarga	120 Juta
Total (Rp.)			414 Juta

Berdasarkan tabel diatas terdapat anggaran-anggaran untuk program pemberdayaan KAT, namun berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang berjumlah 414 Juta yang terdiri dari program bimbingan sosial, bantuan uang tunai, bantuan sembako, dan bantuan alat mata pencaharian memiliki dana yang terpisah dengan program rumah layak huni, karena program tersebut anggarannya diturunkan oleh kementerian yang diambil sebagian dari dana APBN.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir bersama Pekerja Sosial Ahli Muda bahwa pemberdayaan KAT sudah dilaksanakan dengan baik dari Dinas Sosial sesuai dengan kebijakan dari Kementerian tetapi belum bisa berjalan optimal karena kebiasaan buruk masyarakat yang membuat bantuan dapat disalahgunakan serta masyarakat yang kurang aktif dalam membantu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh petugas dengan tujuan agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik, maka di butuhkan kerjasama dan keterlibatan dari masyarakat yang lebih efektif agar bantuan pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Seringkali, program pemberdayaan dibuat oleh pihak luar tanpa melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses perencanaan. Hal ini menyebabkan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat adat, menjadi kurang efektif, dan bahkan mungkin memiliki efek yang merugikan.

Tahap *Assesment*

Tahap ini merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang akan di berdayakan, dan memastikan bahwa program yang akan di targetkan sesuai sasaran, pada tahap ini informasi yang di kumpulkan akan di gunakan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam pemberdayaan, termasuk menentukan jenis bantuan yang tepat dan bagaimana cara distribusi nya, dengan adanya tahapan ini, dapat mempermudah petugas dalam mengkaji sesuatu yang di butuhkan oleh masyarakat serta bisa mendata sesuai keperluan yang terjadi di lapangan maupun dari laporan Pemerintah Desa setempat.

Tabel 2. Tahap *Assesment* Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

No	Program Pemberdayaan KAT	Kegiatan	Tujuan
1	Penyediaan Infrastruktur: rumah layak huni, perbaikan akses jalan dan transportasi, serta pemberian pendidikan	- Identifikasi kondisi tempat tinggal saat ini - Survei kondisi jalan dan transportasi - Pemetaan akses dan kebutuhan pendidikan	Mengetahui kebutuhan infrastruktur dan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup
2	Pemberian sembako setiap tahunnya	- Pendataan jumlah KK - Survei kebutuhan pokok dan tingkat ketahanan pangan	Mengetahui jumlah penerima dan jenis bantuan sembako
3	Bimbingan/sosialisasi pada masyarakat KAT	- Identifikasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah	Menentukan metode bimbingan yang sesuai dengan karakter masyarakat
4	Bantuan alat pendukung mata pencaharian masyarakat KAT	- Pendataan jenis mata pencaharian utama - Identifikasi alat kerja yang di butuhkan dan belum di miliki	Menyesuaikan bantuan alat dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal

5	Pengumpulan sumbangan dalam Daerah	- Diskusi partisipatif dengan warga KAT - Penyusunan skema bantuan	Menyesuaikan jenis sumbangan dengan kebutuhan konteks lokal
6	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	- Penyusunan profil potensi PSKS di wilayah KAT	Menyusun data dasar untuk perencanaan program pemberdayaan yang tepat

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tahap *assesment pemberdayaan* KAT dilakukan sebagai bentuk dalam penyesuaian kebutuhan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, pemahaman terhadap program pemerintah serta alat pendukung mata pencaharian dan lain-lain, karena setiap program itu harus mendahulukan proses pengumpulan data dan analisis yang akurat agar bantuan dapat didistribusikan tepat sasaran sesuai dengan kondisi lokal.

Namun peneliti menemukan fakta yang berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu masyarakat suku Duanu yang merupakan Komunitas Adat Terpencil di Desa Panglima Raja bahwa terkadang masyarakat menerima bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nya, yang mengakibatkan kurang tepatnya sasaran dalam pendataan yang akurat untuk penerima program bantuan pemberdayaan KAT, tahap ini bisa dikatakan belum optimal di jalankan.

Tahap Implementasi

Dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), istilah tahap implementasi mengacu pada proses atau tindakan konkret yang diambil untuk mencapai pemberdayaan bagi komunitas tersebut. Tujuan pemberdayaan KAT adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka melalui peningkatan kapasitas dan akses mereka terhadap berbagai sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hak-hak sosial. Pada tahap implementasi ini, berbagai kegiatan dilakukan, termasuk pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitas dasar, dan pendukung kebijakan yang mendukung hak-hak komunitas adat. Untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik KAT, proses implementasi ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat.

Program pemberdayaan seringkali singkat dan tidak bertahan lama. Setelah program berakhir, masyarakat adat seringkali kembali ke kondisi semula karena mereka tidak dapat mengelola dan mempertahankan program secara mandiri. Masyarakat adat cenderung bergantung terlalu banyak pada bantuan pihak luar karena program pemberdayaan yang tidak berkelanjutan. Ini dapat menghambat kemandirian mereka dan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah mereka sendiri.

Dalam pemberdayaan KAT Dinas Sosial sudah mengimplementasikan program-program sesuai ketentuan yang berlaku, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menemukan fakta bahwa program pemberdayaan di berikan secara bertahap dan bergantian untuk masyarakat hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang membuat kendala dalam pengimplementasian program pemberdayaan KAT, hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 3. Pengimplementasian Program-Program Pemberdayaan KAT

No	Nama Program Pemberdayaan KAT	Terlaksana	Optimal	Belum Optimal
1	Penyediaan Infrastruktur: rumah layak huni, perbaikan akses jalan dan transportasi, serta pemberian pendidikan	✓	-	✓
2	Pemberian sembako setiap tahunnya	✓	-	✓
3	Bimbingan/ sosialisasi pada masyarakat KAT	✓	-	✓
4	Bantuan alat pendukung mata pencaharian masyarakat KAT	✓	-	✓
5	Pengumpulan sumbangan dalam Daerah	x	-	-
6	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	x	-	-

Berdasarkan tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa program-program pemberdayaan KAT sudah dijalankan baik yang sudah di terapkan maupun yang sedang direncanakan namun hal tersebut belum bisa di katakan berjalan dengan optimal karena berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menemukan fakta bahwa rumah layak huni di bangun terakhir pada tahun 2016 untuk beberapa tahun ini tidak dilaksanakan lagi, dan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat suku Duanu di Desa panglima raja menyebutkan program pemberdayaan KAT baik dalam bentuk fisik maupun non fisik juga belum optimal di laksanakan seperti pembagian sembako, bantuan alat mata pencaharian sudah diberikan tetapi masih secara bertahap atau tidak merata untuk masyarakat, kemudian sosialisasi dan bimbingan KAT dilakukan tidak rutin bahkan bisa setahun atau lima tahun sekali. Karena keterbatasan anggaran membuat program-program pemberdayaan belum berjalan lancar. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk percaya diri dalam menggali potensi karena jarang mendapatkan dorongan dari pihak yang memberikan pemberdayaan.

Tahap Evaluasi

Proses evaluasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat penting, yang mencakup dua komponen utama: pengawasan dan pengawasan. Monitoring adalah istilah yang mengacu pada pengawasan atau pengamatan terus-menerus yang dilakukan terhadap program pemberdayaan KAT untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan berkonsentrasi pada memastikan bahwa sumber daya yang digunakan, kebijakan yang diterapkan, dan kegiatan pelaksana program sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak disalahgunakan. Diharapkan pemberdayaan KAT akan berjalan dengan baik, memberikan dampak positif, dan mencapai tujuan jika ada monitoring dan pengawasan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir bahwa program pemberdayaan sosial menunjukkan meskipun ada upaya yang terus dilakukan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Evaluasi dan pemantauan tetap dilakukan, namun terbatasnya anggaran menghambat Dinas Sosial untuk turun langsung ke lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pihak desa tetap berperan aktif dalam memantau dan melaporkan kondisi masyarakat kepada Dinas Sosial. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan penerima bantuan sudah dianggap tepat sasaran. Secara keseluruhan, Maka dalam tahap evaluasi meskipun ada keterbatasan anggaran dan waktu, koordinasi antara pemerintah dan desa masih berjalan, namun efektivitas program pemberdayaan belum optimal karena terbatasnya sumber daya dan partisipasi langsung dari Dinas Sosial.

Pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil perlu dievaluasi secara kritis, karena seringkali program-program ini tidak efektif dan justru menimbulkan dampak negatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan, kurangnya keberlanjutan program, dan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai adat lokal. Pemberdayaan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai adat lokal dapat menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat adat yang negatif. Perubahan ini dapat mengancam identitas dan keberadaan budaya adat. Program pemberdayaan yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai adat lokal dapat menyebabkan perubahan struktur sosial yang negatif, seperti hilangnya peran tokoh adat dan hilangnya kearifan lokal.

Kendala-kendala Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

Hal ini mengacu pada berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Duanu saat berusaha meningkatkan kesehatan, kemandirian, dan kualitas hidup mereka. Suku Duanu adalah salah satu Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tinggal di pesisir Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir. Mereka memiliki budaya dan cara hidup nelayan atau masyarakat laut. Banyak hal terlibat dalam pemberdayaan yang dimaksud, seperti infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, melakukannya seringkali menghadapi kesulitan karena lokasi yang sulit, pendidikan yang rendah, keterbatasan informasi, dan kekurangan fasilitas dasar. Oleh karena itu, untuk membuat program pemberdayaan lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan penting untuk mengidentifikasi hambatan tersebut.

Keterbatasan Anggaran

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Desa Panglima Raja masih dipengaruhi oleh berbagai kendala salah satunya yaitu keterbatasan anggaran, anggaran yang terbatas

menyebabkan pelaksanaan suatu program pemberdayaan kurang efektif, keterbatasan ini terjadi karena dana yang dialokasikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk menjalankan program pemberdayaan, baik dari segi wilayah, kualitas layanan ataupun kegiatan, hanya sebagian masyarakat KAT yang dapat dijangkau untuk menerima pemberdayaan dan berbagai kegiatan pemberdayaan seperti pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dalam menentukan suatu program yang menjadi prioritas serta memberikan perhatian khusus untuk pengimplementasian program dalam menggunakan anggaran yang baik dalam memberdayakan masyarakat KAT untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Keterbatasan anggaran belanja pemerintahan, seharusnya bisa ditopang dengan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Suhadi et al., 2014), terutama bersumber dari perusahaan yang beraktivitas di wilayah Provinsi Riau. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan stakeholders berdasar atas prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Operasional bisnis yang berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar (*local community*) baik langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif dari operasional bisnis perusahaan inilah yang ingin diangkat sebagai alasan atau dasar kewajiban perusahaan melaksanakan CSR sebagai upaya balas budi (Probosiwi, 2016).

Kebiasaan buruk masyarakat

Hal ini merujuk pada pola pikiran dan perilaku hidup yang kurang baik dalam mendukung suatu kesuksesan program pemberdayaan yang akan dijalankan, beberapa contoh kebiasaan ini adalah ketergantungan terhadap bantuan pemberdayaan, kurang aktif untuk menuju perubahan yang lebih baik, rendahnya partisipasi dalam melibatkan diri turut aktif dalam kegiatan pembangunan demi kelancaran program pemberdayaan serta cara pikir mereka yang masih cenderung untuk mempertahankan aktivitas mereka.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa menyebabkan ketidaklancaran program pemberdayaan sehingga tidak berjalan dengan efektif, hal itu di sebabkan karena masyarakat tidak berperan aktif dalam proses perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran penting dalam menunjang keberhasilan suatu program pemberdayaan KAT.

Jarak dan Aksesibilitas yang kurang memadai

Jarak dan aksesibilitas juga termasuk salah satu kendala yang menghambat aktivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan, karena Kecamatan Concong merupakan wilayah yang sebagian besar hanya bisa di akses melewati jalur air dan transportasi yang terbatas, sehingga dapat menyebabkan petugas menjadi sulit untuk menuju ke lokasi-lokasi yang menjadi sasaran karena memakan banyak waktu yang menyebabkan program pemberdayaan sulit menjangkau masyarakat secara rutin serta dapat menghambat pelaksanaan distribusi bantuan berjalan dengan semaksimal mungkin secara berkelanjutan, masyarakat tetap terisolasi dari akses terhadap layanan dasar dalam peningkatan kesejahteraan KAT.

Melihat persoalan keterbatasan aksesibilitas yang terjadi di wilayah Kecamatan Concong ini, pemerintah harus menetapkan kebijakan tentang pembangunan fasilitas perhubungan laut, seperti pembangunan "roll on roll off" (RoRo) seperti yang telah dilakukan diberbagai wilayah di provinsi Riau, contohnya Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Riau, dengan dibangunnya "roll on roll off" (RoRo) di Pulau Rupat dapat membuka akses bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial dan kegiatan ekonomi (Muslim et al., 2023)(Muslim et al., 2024)

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong tepatnya di Desa Panglima Raja sudah berjalan dengan baik karena KAT sudah diberdayakan melalui program-program yang telah dijalankan dan mengalami peningkatan baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan maupun aksesibilitas, yang dulunya hidup diatas sampan namun ketika dilakukan pemberdayaan mereka diberikan rumah layak huni untuk ditempati.

Dalam pemberdayaan KAT program diterapkan melalui empat tahapan pemberdayaan utama, yaitu tahap persiapan dan perencanaan, tahap *assesment*, tahap implementasi serta tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan dan persiapan sudah teridentifikasi mengenai hambatan-hambatan utama dalam pengimplementasian program yang telah dijalankan, pada tahap *assesment* sudah dijalankan namun masih belum cukup optimal dimana kurang tepatnya sasaran dalam penerapan program pemberdayaan KAT dikarenakan dalam pengklasifikasi data bantuan belum diproses dengan akurat sehingga masyarakat harus melaporkan diri ke Kantor Desa, ketiga tahap implementasi sudah berjalan cukup baik dalam penerapan program-program pemberdayaan KAT namun yang menjadi hambatan dalam tahap ini adalah keterbatasan anggaran yang membuat program pemberdayaan KAT disalurkan sesuai anggaran yang tersedia. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta tentu sangat dibutuhkan, sehingga dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), terutama bersumber dari perusahaan yang beraktivitas di wilayah Provinsi Riau dapat membantu proses pemberdayaan masyarakat KAT, serta membuka akses transportasi dengan pembangunan "roll on roll off" (RoRo) seperti yang telah dilakukan diberbagai wilayah di provinsi Riau, dapat membuka akses bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial dan kegiatan ekonomi

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ide dan kemampuan untuk melaksanakan penelitian ini dengan baik, selain itu peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada informan yang dilibatkan dalam penelitian ini Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Camat Concong, Staf Kantor Desa Panglima Raja dan masyarakat Desa Panglima Raja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., Abadi, A., & others. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan komunitas perempuan rawan sosial dan ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27–39.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla*, 1(2), 106–134.
- Hasanah, H., & others. (2016). Peran Perempuan Suku Duanu Dalam Perekonomian Keluarga. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 2(3).
- Hikmawati, N. K. (2022). Community Empowerment Efforts. *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)*, 4(2), 96–103.
- Irwan, M., Rosdiana, R., Hasibuan, J., & Syahputa, D. D. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Pangan Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kampung Matfa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(2), 118–129.
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158–190.
- Muslim, M., Muklis, M., Romus, M., Malau, R. H., & Rachmadi, M. (2023). PENGUATAN NASIONALISME MELALUI AKTIVITAS EKONOMI DI PULAU TERLUAR INDONESIA (STUDI DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS-RIAU). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 175–184.
- Muslim, M., Nurwahidah, A., Muklis, M., & Rachmadi, M. R. (2024). Analysis of Development Policy Based on Economic Activities of the Rupert Island Community. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(2), 15–24.
- Nawawi, A. (2021). Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1824–1838.
- Nurliatin, R., Fahmi, S., & others. (2024). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 648–666.

- Probosiwi, R. (2016). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2), 30–40.
- Suhadi, A., Febrian, A. R., & Turatmiyah, S. (2014). Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 72–82.
- Sururi, A. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*.
- Tchida, C. V, & Stout, M. (2024). Disempowerment versus empowerment: Analyzing power dynamics in professional community development. *Community Development*, 55(3), 386–406.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91–102.
- Triatmanto, B., Apriyanto, G., Hidayatullah, S., & others. (2024). *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. *Sosio Informa*, 2(1).
- Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*. CV. Pena Persada.